



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : PLN KANTOR PUSAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NUR WAHYU DHINIANTO**
2. Jabatan : **EXECUTIVE VICE PRESIDENT TRANSMISI KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, PAPUA, DAN NUSA TENGGARA**
3. NHK : **215738**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 7.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/88 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/300 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
3. Tanah Seluas 96 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
4. Tanah Seluas 376 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 1.507.000.000

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
4. MOTOR, HUSQVARNA MOTOR TRAIL Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.365.600.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.077.553.743
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	12.950.153.743
III. HUTANG	Rp.	480.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	12.470.153.743

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.